

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PEMERINTAH KOTA DUMAI



20 24

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
DAFTAR ISI		i
DAFTAR LAMPIRAN		ii
DAFTAR TABEL		ii
DAFTAR GAMBAR		ii
KATA PENGANTAR		iii
RINGKASAN EKSEKUTIF		iv
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi	2
1.3	Maksud dan Tujuan	5
1.4	Isu-isu Strategis	5
1.5	Cascading Kinerja	6
1.6	Peta Proses Bisnis	7
1.7	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI		10
2.1	Rencana Strategis	10
2.2	Tujuan dan sasaran	11
2.3	Kebijakan, Strategi dan Program	13
2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI		19
A	Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai	19
3.1	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024	21
3.2	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	22
3.3	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target renstra	26
3.4	Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional	27
3.5	Analisa penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi	28
3.6	Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	32
3.7	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	33

3.8	Prestasi dan Penghargaan	35
B	Realisasi Anggaran	35
BAB IV PENUTUP		42

DAFTAR LAMPIRAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

1. Matrik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
2. Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 beserta lampiran perubahan.
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2024
7. Penghargaan (jika ada)

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	13
Tabel 2.2.....	14
Tabel 2.3.....	15
Tabel 2.4.....	16
Tabel 2.5.....	17
Tabel 2.6.....	18
Tabel 3.1.....	20
Tabel 3.2.....	21
Tabel 3.3.....	23
Tabel 3.4.....	28
Tabel 3.5.....	32
Tabel 3.6.....	33
Tabel 3.7.....	34
Table 3.8.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.....	4
Gambar 1.2.....	7
Gambar 1.3.....	8

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Kota Dumai 2025
KEPALA DINAS PPPA



MAINI ASNA, SKM, M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19680529 198903 2 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, maka sebagai unsur teknis, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai menjalankan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
2. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kewenangannya;
3. Pemimpinan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
4. Pengesahan dan penandatanganan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
5. Perekomendasi dan perizinan teknis, serta pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
6. Pembinaan pelaksanaan tugas UPT;
7. Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
8. Pengoordinasian dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
9. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Wali kota dalam pelaksanaan

sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya;

10. Pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah; dan

11. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan MISI yang ke II RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berjati diri Melayu”** dan SASARAN yang ke II yang merupakan Tujuan Strategis Organisasi yaitu **“Mewujudkan masyarakat Dumai yang Produktif, berdaya saing dan sejahtera”**

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai 2021 – 2026 telah menetapkan 1 (satu) Tujuan dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 7 (tujuh) Program, 19 (sembilan belas) Kegiatan dan 52 (lima puluh dua) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2024 antara lain:

I. Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan

1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- Sub kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

- Sub kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang

Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

- Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

- Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

II. Program Perlindungan Perempuan

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

- Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/kota
- Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan

Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

III. Program Kualitas Keluarga

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Sub kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota

IV. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Sub kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

V. Program Pemenuhan Hak Anak

1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

- Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

VI. Program Pemenuhan Hak Anak

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota

- Sub kegiatan Penguatan Kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak anak,

desa/kelurahan layak anak dan DRPPA

2. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK tingkat daerah Kabupaten/Kota

VII. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2024 mengalami 1 kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapat Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standarserta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	95
		Skor Pencapaian Kota Layak Anak	800
		Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	820

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis PD sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar 7.593.367.150 (*Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*) untuk melaksanakan 8 (delapan) Program Kerja antara lain :

Tabel 2

Program Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Pengarusutamaan Gender	Rp. 549.449.500	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
2.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 300.000.000	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 34.957.100	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 200.000.000	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 232.940.844	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 77.217.400	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.240.047.316	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
J U M L A H		Rp. 7.634.612.160	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil – Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 23 September 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Pengarusutamaan Gender	Rp. 549.449.500	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
2.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 444.527.000	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 34.957.100	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 200.000.000	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 232.940.844	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 452.690.400	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.678.802.306	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
J U M L A H		Rp. 7.593.367.150	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil – Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2024	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapat Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standarserta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	95	100	105.27	✓			
		Skor Pencapaian Kota Layak Anak	800	754.13	94.26	✓			
		Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	820	615	75		✓		

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai selama tahun 2024 termasuk kategori sangat tinggi (≤ 90) yaitu Sangat Berhasil (pilih salah satu).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. **7.593.367.150** (*Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*) bersumber dari Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 7.538.785.750 (*Tujuh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp. 54.581.400 (*Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah*).

1. Belanja Operasi	:	Rp.	7.538.785.750
2. Belanja Modal	:	Rp.	54.581.400
Jumlah	:	Rp.	7.593.367.150

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tahun 2024

Tujuan / Sasaran /Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Tujuan : Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar	95%	100%	105.27%			
Sasaran : Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan							
Program : Program perlindungan perempuan	Meningkatnya perlindungan bagi perempuan	40%			444.527.000	392.402.900	88.27
Program : Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya perlindungan khusus anak	60%			452.690.400	259.567.572	57.33
Tujuan : Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak	Skor pencapaian kota layak anak	800	754.13	94.26%			

perempuan dan anak di Kota Dumai							
Sasaran : Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan							
Program : Program Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya capaian skor kota layak anak	80%			232.940.844	193.804.489	83.19
Program : Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Menurunnya Perkawinan Usia Anak	90%			34.957.100	28.872.500	82.59
Tujuan : Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai	Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	820	615	75%			
Sasaran : Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan							
Program : Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG di Kota Dumai	20%			549.449.500	376.985.096	68.61

Program : Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah gender dan anak	40%			200.000.000	150.933.301	75.46
--	---	-----	--	--	-------------	-------------	-------

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai mengalokasikan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2024. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI		KETERANGAN
1.	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar	105,27%	88,10%	1,44	%	Efisien
		Skor Pencapaian Kota Layak Anak	94.26%	98,95%	1,13	%	Efisien
		Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	75%	98,13%	1.13	%	Efisien

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada *Indikator Kinerja Utama* Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar persentase capaian kinerja tahun 2024 (105.27%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (1.44%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**
2. Pada *Indikator Kinerja Utama* Skor Pencapaian Kota Layak Anak persentase capaian kinerja tahun 2024 (94.26%) dibagi dengan persentase penyerapan

anggaran tahun 2024 (1.13%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**

3. Pada *Indikator Kinerja Utama* Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) persentase tingkat efisiensinya adalah **EFISIEN** berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (75%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (1.13%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKIP**) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau persentase.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKIP juga merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Ke 4 atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 5. Peraturan WaliKota Dumai Nomor 60 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2024 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 60 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah, Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

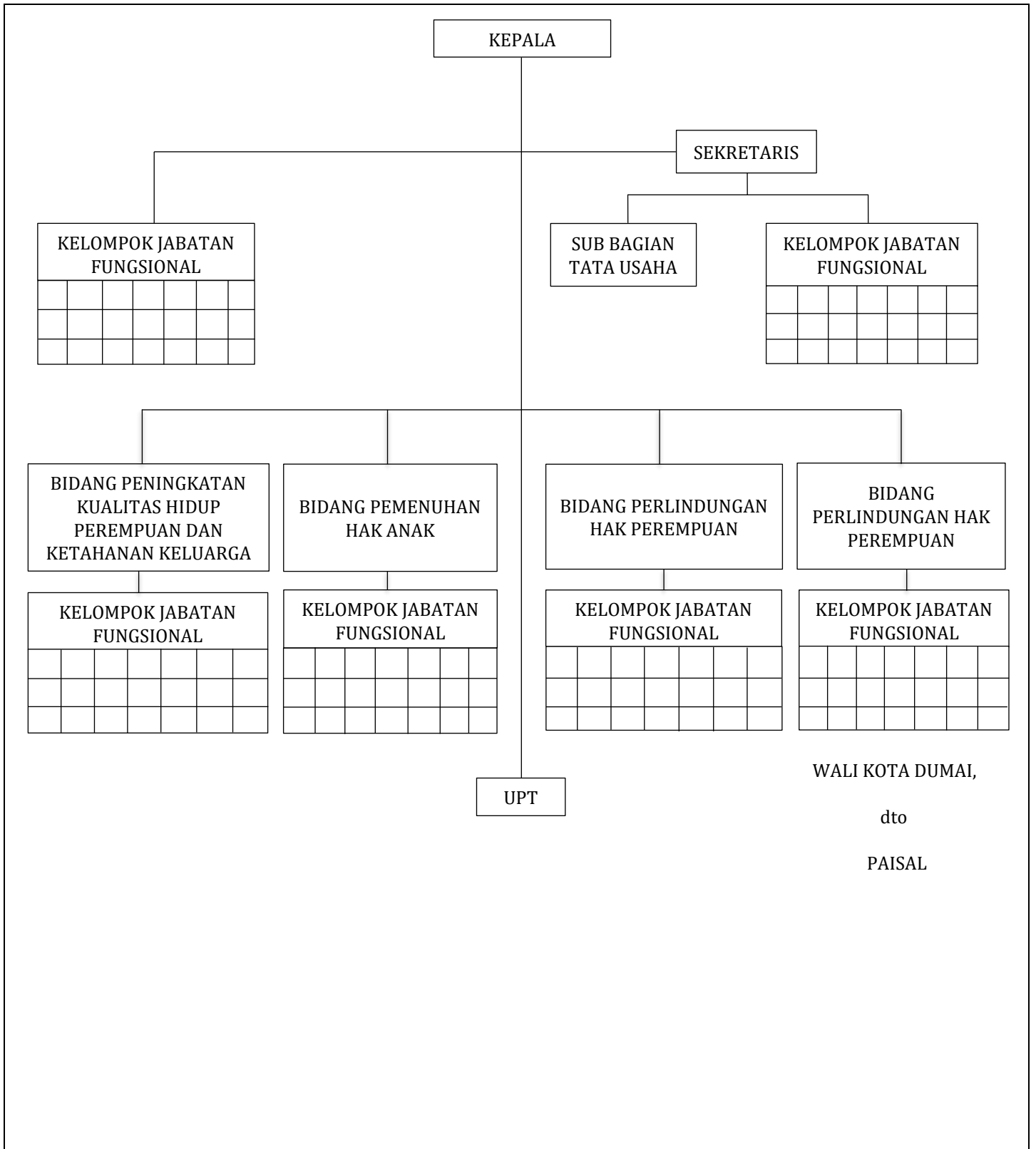
- 1 Penyusunan rencana dan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 2 Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kewenangannya;
- 3 Pemimpinan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- 4 Pengesahan dan penandatanganan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 5 Perekomendasi dan perizinan teknis, serta pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- 6 Pembinaan pelaksanaan tugas UPT;
- 7 Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 8 Pengoordinasian dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 9 Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Wali Kota dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 10 Pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
- 11 Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup fungsinya;

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- g. UPT.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai

1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2024, dengan tujuan :

- 1.3.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 1.3.2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 1.3.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
- 1.3.4 Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4 Isu Strategis

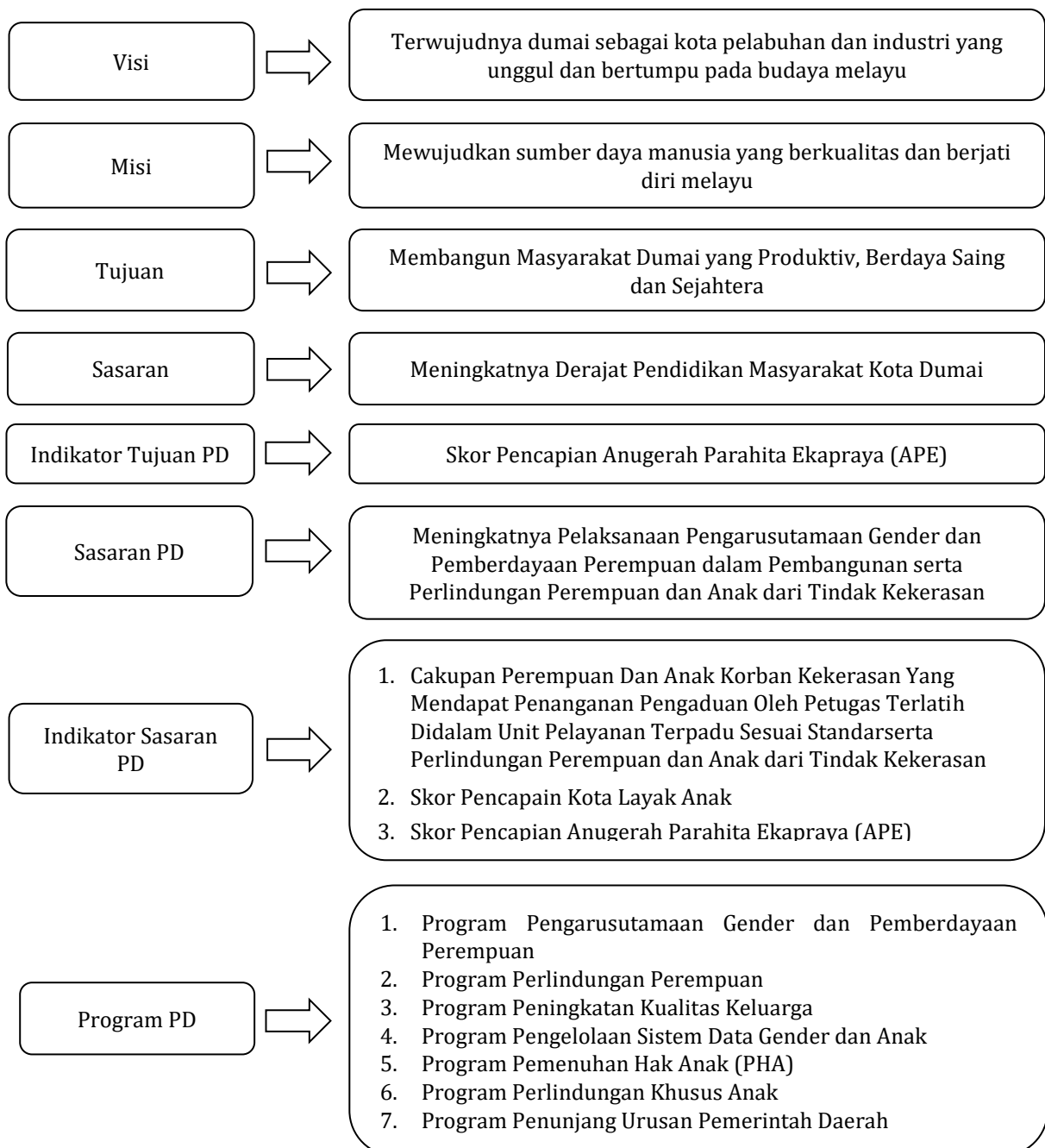
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu–isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang perlu ditangani sbb:

1. Pemanfaatan sistem data terpilah gender berbasis aplikasi sebagai bahan yang digunakan dalam perencanaan penganggaran responsive gender pada perangkat daerah
2. Peningkatan partisipasi perempuan di lembaga legislatif
3. Peningkatan partisipasi Angkatan kerja perempuan
4. Peningkatan pemenuhan hak anak
5. Penurunan perkawinan usia anak
6. Penghapusan kekerasan pada perempuan dan anak
7. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan UPTD PPA
8. Peningkatan partisipasi kelembagaan perempuan dan anak di Kota Dumai

1.5 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



Gambar 1.2

POHON KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

Indikator Kinerja Utama :

1. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapat Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar
2. Skor Pencapaian Kota Layak Anak
3. Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

Meningkatnya Perlindungan Perempuan

Persentase Tingkat Perlindungan Perempuan

Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak

Persentase Tingkat Perlindungan Khusus Anak

Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak

Skor Capaian Kota Layak Anak

Meningkatnya Kualitas Keluarga

Persentase Penurunan Perkawinan Usia Anak

Terwujudnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Persentase ARG di Kota Dumai

Meningkatnya Pemanfaatan Data Terpisah Gender dan Anak

Sistem Data Gender dan Anak

Meningkatnya Layanan Pencegahan Kekerasan dan Perlindungan Perempuan

Indikator Hasil :

1. Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
2. Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi
3. Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan

Meningkatnya Layanan Pencegahan Kekerasan dan Perlindungan Khusus Anak

Indikator Hasil :

1. Jumlah Dokumen Hasil Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak
2. Jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Koordinasi
3. Jumlah Dokumen Hasil Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak

Terlaksananya Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Indikator Hasil :

1. Jumlah Lembaga yang Berperan Dalam Pemenuhan Hak Anak
2. Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak

Indikator Hasil :

Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak

Meningkatnya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Indikator Hasil :

1. Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
2. Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Masyarakat
3. Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan

Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data

Tersedianya Layanan Pencegahan Kekerasan dan Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan

Indikator Hasil :

1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pencegahan Kekerasan Perempuan
2. Jumlah Dokumen Hasil Tindak Lanjut Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan

Tersedianya Layanan Pencegahan Kekerasan dan Perlindungan Khusus Anak

Indikator Hasil :

1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak
2. Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan
3. Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK

Tersedianya Layanan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Indikator Hasil :

1. Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Anak
2. Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
3. Jumlah Dokumen Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga

Indikator Hasil :

Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga

Terlaksananya Sosialisasi PUG dan Layanan Pemberdayaan Perempuan

Indikator Hasil :

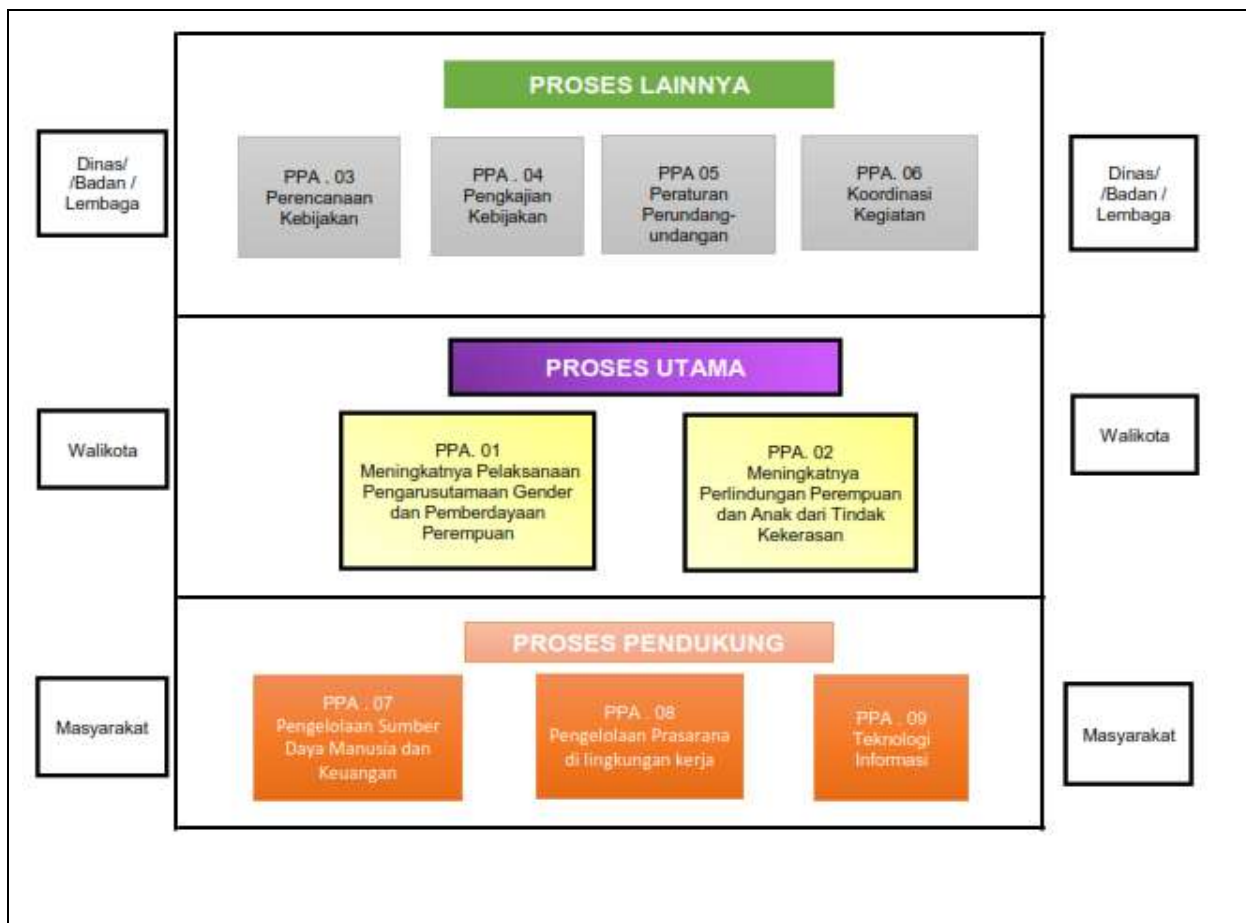
1. Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG
2. Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi PUG
3. Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pemberdayaan Perempuan

1.6 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana skema berikut:

Gambar 1.3

Peta Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



(sesuaikan peta proses bisnis PD masing-masing)

1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1315.1/INSP-S Tanggal 08 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

NO	REKOMENDASI LHE 2023	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	AKSI/ EVIDEN
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam merumuskan perencanaan kinerja agar dapat memuat informasi mengenai keterkaitan hubungan kinerja/integrasi antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang dapat digambarkan melalui Crosscutting	Rumusan perencanaan kinerja sudah digambarkan melalui Crosscutting		1 hari	DPPPA	Selesai	Dokumen perencanaan kinerja
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Agar membuat Nota Dinas dan Notulen terkait monitoring Evaluasi (Monev) dalam mengukur capaian kinerja dalam mengambil keputusan pimpinan	Telah membuat nota dinas dan notulen terkait monitoring evaluasi (Monev) dalam pengukuran capaian kinerja		1 hari	DPPPA	Selesai	Nota Dinas dan Notulen
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai agar membuat laporan monev untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan	Pengukuran capaian kinerja sudah dibuat dalam bentuk laporan capaian kinerja		1 hari	DPPPA	Selesai	Laporan Capaian Kinerja
4	Informasi dalam laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai kedepannya dapat menggunakan informasi dalam laporan kinerja dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian keberhasilan kerja dengan membuat Nota Dinas Evaluasi Kinerja	Telah membuat nota dinas terkait evaluasi pencapaian keberhasilan kerja		1 hari	DPPPA	Selesai	Nota Dinas Evaluasi Kerja

BAB II
PERENCANAAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
DUMAI

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2024 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2024.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Dearah dengan Kepala Daerah**.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang

dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua.

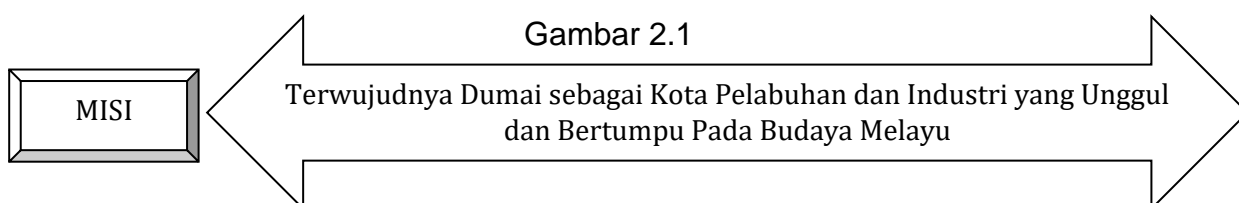
Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:



2.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi perubahan RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian

target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Implementasi pembangunan berkelanjutan dengan spektrum yang luas dan mengandung pengertian komprehensif, tentunya menuntut dalam hal perencanaan, program dan pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimanifestasikan dalam perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 –

2026 menyesuaikan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026

IKU WALI KOTA			IKU DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Renstra
Membangun Masyarakat Dumai yang Produktiv, Berdaya Saing dan Sejahtera	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	Indeks pendidikan	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapat Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar Skor Pencapaian Kota Layak Anak Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

2.3 Kebijakan, Strategi Dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan , Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel 2.2

Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2024

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
MISI ke II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai dst	1.Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di segala bidang pembangunan
			Peningkatan kualitas keluarga
	2.Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO)	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat terkait tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta layanan konseling, mediasi dan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan
			Peningkatan pemahaman kepada masyarakat luas terhadap regulasi perlindungan perempuan dan anak
	Terwujudnya kota dumai sebagai kota layak anak	Meningkatnya kualitas anak	Pengembangan pusat layanan anak

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Pemenuhan Hak Anak
6. Program Perlindungan Khusus Anak

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai

NO	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dst	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar 2. Skor Pencapaian Kota Layak Anak 3. Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai di Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar	95 %
		Skor Pencapaian Kota Layak Anak	800
		Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	820

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 7.634.612.160 (*Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*) untuk melaksanakan 7 (Tujuh) Program Kerja antara lain :

Tabel 2.5
Program kerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 549.449.500	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
2.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 300.000.000	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 34.957.100	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 200.000.000	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
5.	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp. 232.940.844	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 77.217.400	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.240.047.316	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
J U M L A H		Rp. 7.634.612.160	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil – Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 15 November 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Program kerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 549.449.500	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
2.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 444.527.000	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 34.957.100	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 200.000.000	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
5.	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp. 232.940.844	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 452.690.400	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.678.802.306	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
J U M L A H		Rp. 7.593.367.150	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil – Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
DUMAI TAHUN 2024

A. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai

peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

a. Rumus :
$$capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

b. Rumus :
$$capaian = target - \frac{realisasi - target}{target} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel 3.2
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

a. Indikator Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar

Capaian kinerja untuk indikator Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 95% realisasi sebesar 100%, tercapai 105.27% atau bernilai kinerja ≥ 90 (sangat tinggi). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 100 % atau tercapai sebesar 105.27%, maka capaian tahun 2024 tetap sebesar 100%.

Efisiensi Anggaran	1.44%
Nilai Anggaran	Rp. 897.217.400
Capaian 2024	105.27%
Target	95%
Realisasi	100%

b. Indikator Skor Pencapaian Kota Layak Anak

Capaian kinerja untuk indikator Skor Pencapaian Kota Layak Anak menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 800 realisasi sebesar 754.13, tercapai 94.26% atau bernilai kinerja $76 \leq 90$ (tinggi). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 754.13 atau tercapai sebesar 100.5%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 94.26%.

Efisiensi Anggaran	1.13%
Nilai Anggaran	Rp. 267.897.944
Capaian 2024	94.26%
Target	800
Realisasi	754.13

c. Indikator Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

Capaian kinerja untuk indikator Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 820 realisasi sebesar 615, tercapai 75% atau bernilai kinerja $66 \leq 75$ (sedang). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 615 atau tercapai sebesar 75.93%, maka capaian tahun 2024 menurun 75%.

Efisiensi Anggaran	1.13%
Nilai Anggaran	Rp. 749.449.500
Capaian 2024	75%
Target	820
Realisasi	615

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan perbandingan untuk melihat tabel peningkatan atau penurunan suatu capaian kinerja, sehingga bisa dievaluasi dan diperbaiki untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

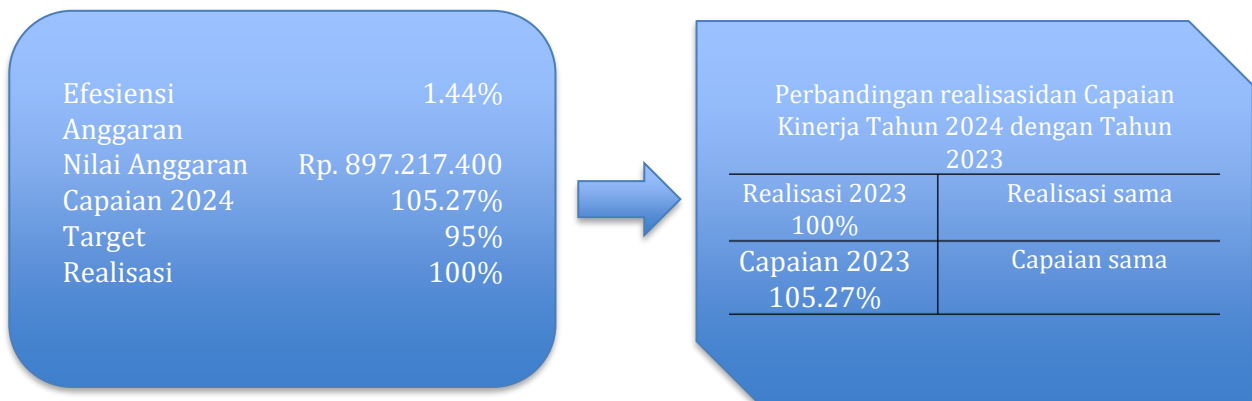
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian			
			dst	2022	2023	2024	dst	2022	2023	2024	dst	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dst	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar		95%	95%	95%		105.27%	105.27%	105.27%		100%	100%	100%
		Skor Pencapaian Kota Layak Anak		700	750	800		703.5	754.13	754.13		105.3%	100.5%	94.26%
		Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)		3187	810	820		3862.5	615	615		121.5%	75.93%	75%

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

9. a. Pada tahun 2022 terdapat 3 Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 5 tahun kedepan. Indikator pertama adalah Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar dengan target pada tahun 2022 adalah 95% berasal dari perhitungan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar dibagi dengan jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang berkunjung di UPT PPA dikali 100%.

- b. Pada tahun 2023 terdapat 3 Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 5 tahun kedepan. Indikator pertama adalah Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar dengan target pada tahun 2023 adalah 95%. Realisasi pada tahun 2023 adalah 100% dengan capaian 105.27%

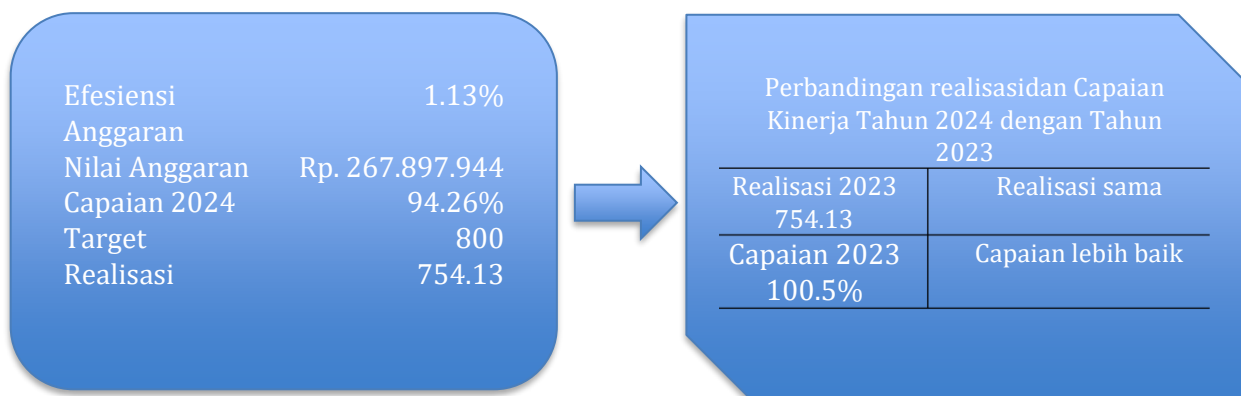
- c. Pada tahun 2024 target kinerja tetap menjadi 95% dan realisasinya adalah 100% dengan rincian 28 orang pada data kasus kekerasan pada perempuan, dan 109 orang pada data kasus kekerasan pada anak. Dengan demikian total kasus pada perempuan dan anak 137 dan jumlah korban yang telah mendapat penanganan pengaduan sesuai standar sebanyak 137 orang dan capaian kinerja sebesar 105.27%



2 a. Indikator Kinerja Utama yang ke dua adalah Skor Pencapaian Kota Layanan Anak dengan target pada tahun 2022 adalah 700 berasal dari perhitungan Skor verifikasi administrasi dibagi dengan Skor evaluasi mandiri.

b. Pada tahun 2023 Indikator Skor Pencapaian Kota Layak Anak dengan target skor pada tahun 2023 adalah 750. Realisasi pada tahun 2023 adalah 754.13 dengan capaian 100.5%

c. Pada tahun 2024 target kinerja tetap menjadi 800 dan realisasinya adalah 754.13 dan capaian kinerja sebesar 94.26%. Skor capaian kota layak anak pada tahun 2024 masih pada skor yang sama dengan tahun 2023, karena skor capaian kota layak anak tahun 2024 belum dapat diperoleh.

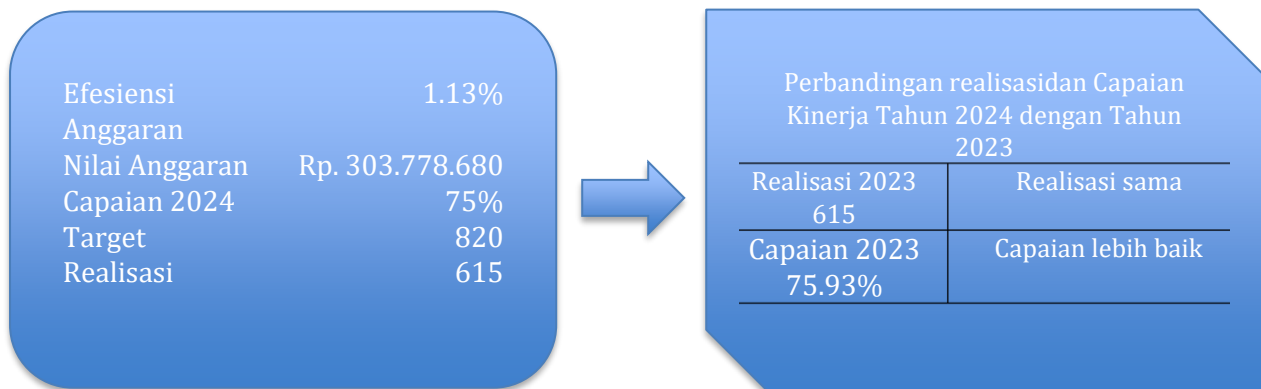


3 a. Indikator Kinerja Yang ke ketiga adalah Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dengan target pada tahun 2022 adalah 3187 berasal dari perhitungan nilai dimensi prasyarat ditambah nilai dimensi pelaksanaan dibagi dua.

b. Pada tahun 2023 Indikator Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dengan target skor pada tahun 2023 adalah 810. Dengan adanya perubahan cara perhitungan evaluasi pada Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) menyebabkan terjadinya penurunan skor target. Realisasi pada tahun 2023 adalah 615 dengan capaian 75.93%

c. Pada tahun 2024 target kinerja tetap menjadi 820 dan realisasinya adalah 615 dan capaian kinerja sebesar 75%. Skor capaian anugerah parahita ekapraya (APE)

pada tahun 2024 masih pada skor yang sama dengan tahun 2023, karena skor capaian anugerah parahita ekapraya (APE) tahun 2024 belum dapat diperoleh.

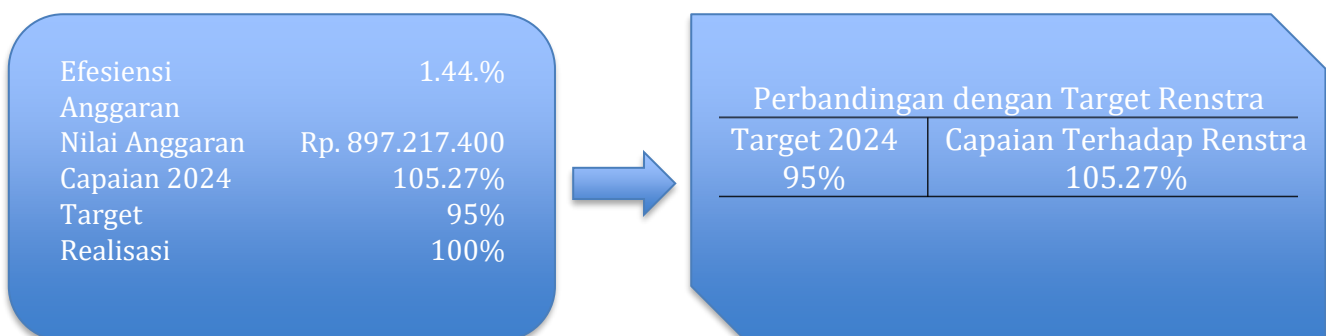


3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2024 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yaitu:

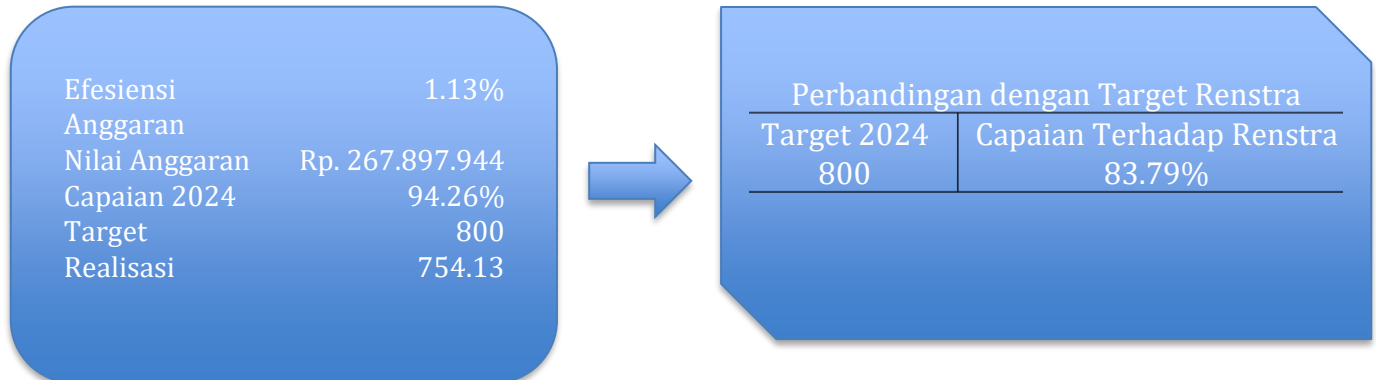
a. Indikator Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar tahun 2024 sudah melebihi dari target akhir Renstra yaitu sebesar 105.27% dari target Renstra sebesar 95% dan terealisasi 100% pada tahun 2024.



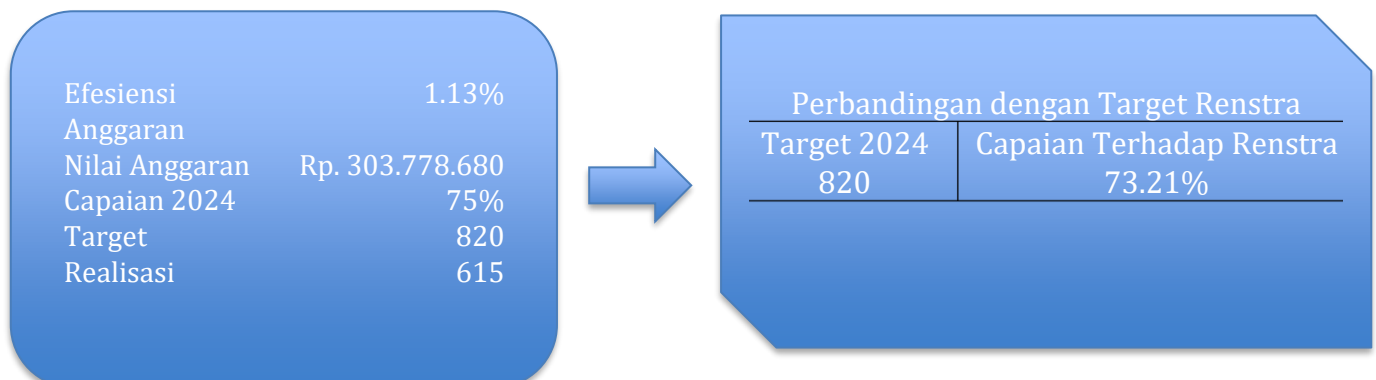
b. Indikator Skor Pencapaian Kota Layak Anak

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Skor Pencapaian Kota Layak Anak tahun 2024 kurang dari target akhir Renstra yaitu sebesar 83.79% poin dari target Renstra sebesar 900 poin dan terealisasi 754.13 pada tahun 2024.



c. Indikator Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Skor Pencapaian Anugerah Ekapraya (APE) tahun 2024 kurang dari target akhir Renstra yaitu sebesar 73.21% dari target Renstra sebesar 840 poin dan terealisasi 615 poin pada tahun 2024.



3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan standar Nasional sebagaimana table 3.3 berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	STANDAR NASIONAL	KETERANGAN
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar	100%	-	Tidak ada
		Skor Pencapaian Kota Layak Anak	754.13	-	Tidak ada
		Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	615	-	Tidak ada

3.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi

1. Indikator Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar

- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 95% realisasi sebesar 100%, tercapai 105.27% atau bernilai kinerja ≥ 90 (sangat tinggi). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 100% atau tercapai sebesar 105.27%, maka capaian tahun 2024 tetap sebesar 105.27%
- b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Terealisasinya seluruh kegiatan pada program-program pendukung capaian indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu

sesuai standar.

- Terlayani nya seluruh korban perempuan dan anak pada kasus kekerasan yang masuk di UPT PPA.
 - Terlaksananya pendampingan kasus, kegiatan gelar kasus dan penjangkauan korban oleh UPT PPA.
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar adalah sebagai berikut:
- Masih rendahnya jumlah SDM UPT PPA yang tersedia dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak
 - Masih kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis satgas peduli perempuan dan anak dalam hal penjangkauan kasus kekerasan perempuan dan anak
- d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar adalah sebagai berikut:
- Meningkatkan jumlah SDM UPT PPA yang berkompeten
 - Meningkatkan pelatihan dan bimbingan teknis kepada satgas peduli perempuan dan anak yang ada di kecamatan dan kelurahan sebagai perpanjangan tangan Dinas PPPA Kota Dumai dalam hal penjangkauan kasus kekerasan perempuan dan anak
 - Meningkatkan Kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam hal penjangkauan, pemantauan, pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

2. Indikator Skor Pencapaian Kota Layak Anak

- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Skor Pencapaian Kota Layak Anak menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 800 realisasi sebesar 754.13, tercapai 94.26% atau bernilai kinerja ≥ 90 (sangat tinggi). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 754.13 atau tercapai sebesar 100.5%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 94.26%

- b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Skor Pencapaian Kota Layak Anak kurang target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
- Terealisasinya seluruh kegiatan pada program-program pendukung capaian indikator skor pencapaian kota layak anak
 - Terlaksananya kegiatan yang menjadi syarat terpenuhinya pencapaian kota layak anak
 - Terlaksananya kerjasama dengan beberapa perangkat daerah atau lintas sektor terkait pencapaian dumai kota layak anak.
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Skor Pencapaian Kota Layak Anak adalah sebagai berikut:
- Masih rendahnya komitmen beberapa perangkat daerah dalam pencapaian Dumai sebagai kota layak anak.
 - Masih rendahnya peraturan daerah tentang kota layak anak.
- d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Skor Pencapaian Kota Layak Anak adalah sebagai berikut:
- Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam hal pencapaian Dumai sebagai kota layak anak;
 - Memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam pencapaian kota layak anak;
 - Meningkatkan advokasi kepada perangkat daerah dalam memberikan inovasi pengembangan kegiatan;
 - Melakukan advokasi kepada kepala daerah kota dumai dan DPRD untuk terwujudnya perda kota layak anak

3. Indikator Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 820 realisasi sebesar 615, tercapai 75% atau bernilai kinerja $76 \leq 90$ (tinggi). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 615 atau tercapai sebesar 75.93%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 94.26%.

- b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kurang dari target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
- Terealisasinya seluruh kegiatan pada program-program pendukung capaian indikator skor pencapaian kota layak anak.
 - Terlaksananya kegiatan yang menjadi syarat terpenuhinya pencapaian anugerah parahita ekapraya (APE) dan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG).
 - Terlaksananya kerjasama dengan beberapa perangkat daerah atau lintas sektor terkait pencapaian anugerah parahita ekapraya (APE) dan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG).
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) adalah sebagai berikut:
- Kurangnya komitmen perangkat daerah dalam pelaksanaan perencanaan penganggaran responsive gender (PPRG).
 - Kurangnya media informasi terkait pelaksanaan perencanaan penganggaran responsive gender (PPRG).
- d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) adalah sebagai berikut:
- Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG).
 - Memperkuat kerjasama tim dalam hal penyebaran informasi tentang perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)

3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	IKU	Sasaran Program	Indikator Program	Nama Program	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Satuan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	capaian anggaran (%)
1	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan	Program Perlindungan Perempuan	40	100	%	444.527.000	392.402.900	88.27
		Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	60	100	%	452.690.400	259.567.572	57.33
2	Skor Pencapaian Kota Layak Anak	Tercapainya Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak	80	99.5	%	232.940.844	193.804.489	83.19
		Meningkatnya Kualitas Keluarga	Menurunnya Perkawinan Usia Anak	Peningkatan Kualitas Keluarga	90	100	%	34.957.100	28.872.500	82.59
3	Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya	Terwujudnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG di Kota Dumai	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	20	83.71	%	549.449.500	314.389.496	57.21
		Tersedianya Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatnya Pemanfaatan Data Terpisah Gender dan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	40	100	%	200.000.000	150.933.301	75.46

3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar	105.27	72.8
		Skor Pencapaian Kota Layak Anak	754.13	82.89
		Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	615	66.33

Berdasarkan table diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut::

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama pertama yaitu Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar* tingkat efisiensinya adalah 1.44% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (105.27%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (72.8%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- b. Pada *Indikator Kinerja Utama kedua yaitu Skor Pencapaian Kota Layak Anak* tingkat efisiensinya adalah 1.13 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (94.26%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (82.89%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- c. Pada *Indikator Kinerja Utama ketiga yaitu Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)* tingkat efisiensinya adalah 1.13 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (75%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (66.33%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

3.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7
Prestasi dan Penghargaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Kota Layak Anak	Nindya	Nasional	Kementrian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
2	Anugerah Parahita Ekapraya	Madya	Nasional	Kementrian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

Catatan : Agar dilengkapi dengan dokumentasi dan data dukung dalam penjelasan yang diuraikan. Dapat ditambahkan dengan grafik, diagram, foto dan screenshot gambar sebagai eviden.

B. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2024. Adapun Anggaran per Sasaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.8 Ringkasan Anggaran dan realisasi Tahun 2024

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Alokasi Anggaran(Rp)	Realisasi
1	Program Pengarusutamaan Gender	549.449.500	376.985.096
1	Kegiatan pelebagaan pengarusutamaan gender (pug) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	190.887.300	174.018.896
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	85.930.600	83.915.625

	2	Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	65.000.000	53.629.375
	3	Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	39.956.700	36.473.896
	2	Kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	59.562.200	47.127.200
	1	Sub Kegiatan Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, social dan ekonomi	55.000.000	43.565.000
	2	Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, social, dan ekonomi	3.562.200	3.562.200
	3	Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	300.000.00	155.839.000
	1	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	150.000.000	89.574.000
	2	Sub Kegiatan Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	150.000.000	66.265.000
	2	Program Perlindungan Perempuan	444.527.000	392.402.900
	1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	155.000.000	144.451.350
	1	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	120.000.000	111.551.350

	2	Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	35.000.000	32.900.000
	2	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	164.527.000	147.188.000
	1	Sub Kegiatan Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	45.000.000	42.500.000
	2	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan	119.527.000	104.688.000
	3	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000	100.762.550
	1	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	60.000.000	35.769.550
	2	Sub Kegiatan Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten/kota	25.000.000	24.994.000
	3	Sub Kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	40.000.000	40.000.000
	3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	34.957.100	28.872.500
	1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.957.100	28.872.500
	1	Sub Kegiatan Pengembangan kegiatan masyarakat untuk kegiatan peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	34.957.100	28.872.500

4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	200.000.000	150.933.301
	1 Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	150.933.301
	1 Sub Kegiatan Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota	100.000.000	72.323.500
	2 Sub Kegiatan Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota	100.000.000	78.609.801
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	232.940.844	193.804.489
	1 Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	72.555.444	67.494.289
	1 Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	30.000.000	28.587.400
	2 Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	42.555.444	38.906.889
	2 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	160.385.400	126.310.200
	1 Sub Kegiatan Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	119.992.500	100.008.600
	2 Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	40.392.900	26.301.600
6	Program Perlindungan Khusus Anak	452.690.400	259.567.572

	1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	72.555.444	67.494.289
	1	Sub Kegiatan Penguatan kerjasama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan layak anak dan DRPPA	65.000.000	64.965.000
	2	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	262.290.400	214.687.300
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	20.260.000
	2	Sub Kegiatan Koordinasi Layanan AMPK	232.290.400	192.427.300
	3	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	125.400.000	85.208.572
	1	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	125.400.000	85.208.572
	7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.678.802.306	5.135.201.443
	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.354.720	34.455.920
	1	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	12.399.920	11.949.920
	2	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	5.887.000	5.887.000
	3	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	4.479.000	4.479.000
	4	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	4.028.800	4.028.800

	5	Sub Kegiatan penyusunan perubahan DPA-SKPD	3.008.800	1.200.000
	6	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9.880.600	4.840.600
	7	Sub Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah	7.670.600	2.070.600
	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.876.217.750	3.565.889.849
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.876.217.750	3.565.889.849
	3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	518.103.844	473.720.718
	1	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.590.300	4.598.100
	2	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	125.000.000	110.636.966
	3	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	25.000.000	20.000.000
	4	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistic kantor	56.000.000	46.613.700
	5	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan	84.999.798	79.855.300
	6	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.728.000	6.440.000
	7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	213.785.746	205.576.652
	4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	195.554.600	134.765.418
	1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	20.000.000	19.990.418
	2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.554.600	0
	3	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	140.000.000	114.775.000
	5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	916.374.874	824.104.867
	1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	174.000	170.000
	2	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	111.216.480	94.092.377

	3	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10.043.674	6.682.000
	4	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	794.940.720	723.160.490
	6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.196.518	102.264.671
	1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	38.530.000	32.000.000
	2	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	68.221.000	59.827.520
	3	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5.680.000	3.825.000
	4	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistic kantor	6.055.518	6.007.151
	5	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	6.710.000	605.000

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKIP**) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya kepada semua elemen masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun anggaran 2024 di Kota Dumai.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan tentang Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024, maka dapat disimpulkan:

- 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki 3 Indikator Kinerja Utama, dengan predikat capaian “SANGAT BERHASIL” sebanyak 2 (dua) indikator, dan predikat “BERHASIL” sebanyak 1 (satu) indikator. Dengan demikian secara keseluruhan terkait dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat dikatakan “SANGAT BERHASIL”;
- 2) Dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama. Secara keseluruhan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai mendapat kategori tingkat efisiensi “EFISIEN”.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKIP**) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai tahun 2024, maka diperlukan strategi dan tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yang akan datang yaitu :

- 1) Meningkatkan kinerja pelayanan public;
- 2) Meningkatkan kualitas SDM Aparatur;

- 3) Meningkatkan akuntabilitas kinerja
- 4) Meningkatkan kualitas media informasi pelayanan dan penanganan kasus
- 5) Meningkatkan komitmen dan kerjasama perangkat daerah dan lintas sektor dalam pencapaian kota layak anak
- 6) Meningkatkan kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak

Kota Dumai,

2025



KEPALA DINAS PPPA

MAINI ASNA, SKM, M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19680529 198903 2 002

LAMPIRAN

Matrik Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021 - 2026

VISI : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan bertumpu pada budaya melayu
MISI : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri melayu
SASARAN : Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KETERANGAN	
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak dikota Dumai	Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)				3187	810	820	830	840	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapat Penanganan terpadu sesuai standar dibagi jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang berkunjung di Upt PPA dikali seratus persen	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar dibagi jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang berkunjung di Upt PPA dikali seratus persen			95	95	95	95	95	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat terkait Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, serta Layanan Konseling, Mediasi dan Pendampingan kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Peningkatan pemahaman kepada masyarakat luas terhadap regulasi Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Program Perlindungan Perempuan 2. Program Perlindungan Khusus Anak		21
										Skor Pencapaian Kota Layak Anak	Skor verifikasi administrasi dibagi skor evaluasi mandiri dikali seribu			700	750	800	850	900	Terwujudnya Kota Dumai sebagai Kota Layak Anak	1. Meningkatkan kualitas anak 2. Pengembangan pusat layanan anak	1. Pemenuhan Hak Anak 2. Program Peningkatan Kualitas			

**PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	2024	Target Tahunan			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu sesuai standart	%	95	95	95	95
		Skor pencapaian Kota Layak Anak	skor	750	800	850	900
		Skor pencapaian Anugrah Parahita Ekapraya (APE)	skor	810	820	830	840

Dumai, 23 September 2024

KEPALA



MAINI ASNA, SKM, M. Si

NIP. 19680529 198603 2 002

PERJANJIAN KINERJA 2024

ESSELON II



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MAINI ASNA, SKM, M.Si**

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. PAISAL, SKM. MARS**

Jabatan : WALI KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



H. PAISAL, SKM. MARS



MAINI ASNA, SKM, M. Si
NIP. 19680529 198903 2 002

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK PERTAMA,

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	95
		Skor pencapaian Kota Layak Anak	800
		Skor pencapaian Anugerah Parahita Ekanrava (APE)	820

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
I.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp 549.449.500	
II.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp 300.000.000	
III.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp 34.957.100	
IV.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp 200.000.000	
V.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp 232.940.844	
VI.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp 77.217.400	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 6.240.047.316,00	Pendukung



 PIHAK KEDUA
H. PAISAL, SKM. MARS

Dumai, 1 Februari 2024
 PIHAK PERTAMA


MAINI ASNA, SKM, M. Si
 NIP. 19680529 198903 2 002

ESSELON III



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JUSNIDAR, SKM**

Nama : **SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **MAINI ASNA, SKM, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 01 Februari 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,



MAINI ASNA, SKM, M.Si
NIP. 19680529 198903 2 002

JUSNIDAR, SKM
NIP. 19750923 199703 2 004

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Program	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/Kota	%	100

Dumai, 01 Februari 2024



Pihak Kedua
KEPALA

[Signature]
MAINI ASNA, SKM, M. Si
NIP. 19860529 198603 2 002

Pihak Pertama
SEKRETARIS

[Signature]
JUSNIDAR, SKM

NIP. 19750923 199703 2 004



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NOVA KURNIASARY, SE**
Nama : **KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
DAN KETAHANAN KELUARGA**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **MAINI ASNA, SKM, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 01 Februari 2024

PIHAK KEDUA



MAINI ASNA, SKM, M.Si
NIP. 19680529 198903 2 002

PIHAK PERTAMA,

NOVA KURNIASARY, SE
NIP. 19721102 200604 2 011

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Program	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Persentase ARG di Kota Dumai	%	20

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp	549,449,500
1.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	Rp	190,887,300
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	85,930,600
1.1.2	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp	65,000,000
1.1.3	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp	39,956,700
1.2	Pemberdayaan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	58,562,200
1.2.1	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Rp	55,000,000
1.2.2	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Rp	3,562,200
1.3	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	300,000,000
1.3.1	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Rp	150,000,000
1.3.2	Pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Rp	150,000,000
	Jumlah		549,449,500

Dumai, 01 Februari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA

KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
PEREMPUAN DAN KETAHANAN KELUARGA



MAINI ASNA, SKM, M. Si
NIP. 19680529 198903 2002

NOVA KURNIASARY, SE
NIP. 19721102 200604 2 011



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DARNITAWATI, S.Sos**

Nama : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **MAINI ASNA, SKM, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 01 Februari 2024

PIHAK KEDUA



MAINI ASNA, SKM, M.Si
NIP. 19680529 198903 2 002

PIHAK PERTAMA,

DARNITAWATI, S.Sos
NIP. 19660420 199202 2 001

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Program	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Meningkatnya Perlindungan bagi Perempuan	%	40
		Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	%	60

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp 215,000,000	
1.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 90,000,000	
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 55,000,000	
1.1.2	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Rp 35,000,000	
1.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 125,000,000	
1.2.1	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Rp 60,000,000	
1.2.2	Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten/kota	Rp 25,000,000	
1.2.3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 40,000,000	
2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp 37,000,000	
2.1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 37,000,000	
2.1.1	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Rp 37,000,000	
	Jumlah	Rp 252,000,000	


Dumai, 01 Februari 2024

Pihak Kedua
KEPALA



MAINI ASNA, SKM, M. Si
NIP. 19680529 198903 2 002

Pihak Pertama
Kepala Bidang Perlindungan
Hak Perempuan



DARNITAWATI, S.Sos
NIP. 19660420 199202 2 001



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YAYUK DWI RAHAYU, S.Farm.Apt, M.Sc**

Nama : **KEPALA BIDANG DATA INFORMASI GENDER DAN ANAK**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **MAINI ASNA, SKM, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 01 Februari 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,



MAINI ASNA, SKM, M.Si
NIP. 19680529 198903 2 002

YAYUK DWI RAHAYU, S.Farm.Apt, M.Sc
NIP. 19790817 200904 2 003

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Program	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.	Meningkatnya Pemanfaatan Data Terpilah Gender dan Anak	%	40

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp 200,000,000	
1.1	<i>Pengumpulan, Pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota</i>	Rp 200,000,000	
1.1.1	Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota	Rp 100,000,000	
1.1.2	Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota	Rp 100,000,000	
	Jumlah	Rp 200,000,000	

Dumai, 01 Februari 2024

Pihak Kedua
KEPALA



MAINI ASNA, SKM, M.Si
NIP. 19680529 198903 2 002

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG DATA INFORMASI
GENDER DAN ANAK



YAYUK DWI RAHAYU, S.Farm.Apt, M.Sc
NIP. 19790817 200904 2 003



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ns. SRI BULAN, S.Kep**

Nama : **KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **MAINI ASNA, SKM, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 01 Februari 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,



MAINI ASNA, SKM, M.Si
NIP. 19680529 198903 2 002

Ns. SRI BULAN, S.Kep
NIP. 19680414 198811 2 001

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Program	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Meningkatnya capaian Kota Layak Anak	%	80
		Menurunnya Perkawinan Usia Anak	%	90

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	232,940,844
1.1	Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Rp	72,555,444
1.1.1	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota.	Rp	30,000,000
1.1.2	Koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Rp	42,555,444
1.2	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Rp	160,385,400
1.2.1	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota.	Rp	119,992,500
1.2.2	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Rp	40,392,900
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	34,957,100
2.1	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota	Rp	34,957,100
2.1.1	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	Rp	34,957,100
	Jumlah	Rp	267,897,944

Dumai, 01 Februari 2024

Pihak Kedua
KEPALAPihak Pertama
KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN
PERLINDUNGAN ANAK

MAINI ASNA, SKM, M. Si
NIP. 19680529 198903 2 002

Ns. SRI BULAN, S. Kep
NIP. 19680414 198811 2 001

ESSELON IV



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LILI KURNIATI, S.Tr.Keb**
Nama : **KASUBBAG TATA USAHA**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **JUSNIDAR, SKM**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 01 Februari 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,


JUSNIDAR, SKM
NIP. 19750923 199703 2 004


LILI KURNIATI, S.Tr.Keb
NIP. 19770727 200604 2 021

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3
		Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 774,354,720	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 47,354,720	
1.1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp 12,399,920	
1.1.2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Rp 5,887,000	
1.1.3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Rp 4,479,000	
1.1.4	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Rp 4,028,800	
1.1.5	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Rp 3,008,800	
1.1.6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 9,880,600	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
1.1.7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp	7,670,600	
1.2	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Rp	727,000,000	
1.2.1	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp	727,000,000	
	Jumlah	Rp	774,354,720	

Dumai, 01 Februari 2024

Pihak Kedua
SEKRETARIS


JUSNIDAR, SKM

NIP. 19750923 199703 2 004

Pihak Pertama
KASUBBAG TATA USAHA


LILI KURNIATI, S. Tr. Keb
NIP. 19770727 200604 2 021



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FAJARIA RUSMEITY, SKM**

Nama : **KEPALA UPT PPA**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **MAINI ASNA, SKM, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 01 Februari 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,



MAINI ASNA, SKM, M.Si
NIP. 19680529 198903 2 002

FAJARIA RUSMEITY, SKM
NIP. 19780524 200501 2 007

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	12
		Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Layanan	55
		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	50
		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Orang	10

Dumai, 01 Februari 2024

Pihak Kedua
 KEPALA

MAINI ASNA, SKM, M. Si
 NIP. 19680529 198903 2 002



Pihak Pertama
 KEPALA UPT PPA

FAJARIA RUSMEITY, SKM
 NIP. 19780524 200501 2 007



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RESTI EKO YULIANTI, AMK.**

Nama : **KASUBBAG TATA USAHA UPT PPA**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **FAJARIA RUSMEITY, SKM**

Jabatan : **KEPALA UPT PPA**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 01 Februari 2024

PIHAK KEDUA

**FAJARIA RUSMEITY, SKM
NIP. 19780524 200501 2 007**

PIHAK PERTAMA,

**RESTI EKO YULIANTI, AMK.
NIP. 19800725 200604 2 017**

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	12
		Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Layanan	55
		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	50
		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Orang	10

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp 85,000,000	
1.1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 85,000,000	
1.1.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 45,000,000	
1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 40,000,000	
2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp 40,217,400	
2.1	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Rp 40,217,400	
2.1.1	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Rp 30,000,000	
2.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Rp 10,217,400	
	Jumlah	Rp 125,217,400	

Dumai, 01 Februari 2024

Pihak Kedua
KEPALA UPT PPA


FAJARIA RUSMEITY, SKM
NIP.19780524 200501 2 007

Pihak Pertama
KEPALA SUBBAG TU UPT PPA


RESTI EKO YULIANTI, AMK
NIP.19800725 200604 2 017

**PEJABAT
FUNGSIONAL
PENYETARAAN**



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YUNI WELDA, SE. M.IP**

Nama : **ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **JUSNIDAR, SKM**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 01 Februari 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,

JUSNIDAR, SKM
NIP. 19750923 199703 2 004

YUNI WELDA, SE. M.IP
NIP. 19770614 200501 2 008

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	32

Dumai, 01 Februari 2024

Pihak Kedua
SEKRETARIS



JUSNIDAR, SKM
NIP. 19750923 199703 2 004

Pihak Pertama
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
AHLI MUDA



YUNI WELDA, SE. M.IP
NIP. 19770614 200501 2 008



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DEWI YASMANIDAR, SKM, M.IP**

Nama : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **NOVA KURNIASARY, SE**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
DAN KETAHANAN KELUARGA**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 01 Februari 2024

PIHAK KEDUA

**NOVA KURNIASARY, SE
NIP. 19721102 200604 2 011**

PIHAK PERTAMA,

**DEWI YASMANIDAR, SKM, M.IP
NIP. 19690826 199303 2 004**

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1
		Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG) kewenangan kabupaten/kota	Perangkat daerah	37
		Jumlah perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG) kewenangan kabupaten/kota	Perangkat daerah	37

Dumai, 01 Februari 2024

Pihak Kedua
 KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS
 HIDUP PEREMPUAN DAN KETAHANAN
 KELUARGA


NOVA KURNIASARY, SE
 NIP. 19721102 200604 2 011

Pihak Pertama
 ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


DEWI YASMANIDAR, SKM, M. IP
 NIP. 19690826 199303 2 004



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AKMALIA YARNELINUR, SKM.**
Nama : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **NOVA KURNIASARY, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
DAN KETAHANAN KELUARGA**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 01 Februari 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,

NOVA KURNIASARY, SE
NIP. 19721102 200604 2 011

AKMALIA YARNELINUR, SKM.
NIP. 19821123 200501 2 004

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1
		Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	Organisasi	1
		Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	150
		Jumlah dokumen informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang tersedia	Dokumen	1

Dumai, 01 Februari 2024

Pihak Kedua
 KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS
 HIDUP PEREMPUAN DAN KETAHANAN
 KELUARGA


NOVA KURNIASARY, SE
 NIP. 19721102 200604 2 011

Pihak Pertama
 ANALIS KEBIJAKAN
 AHLI MUDA


AKMALIA YARNELINUR, SKM
 NIP. 19821123 200501 2 004



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MURNI ASNITA, S.Sos, M.Si**
Nama : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **DARNITAWATI, S.Sos**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 01 Februari 2024

PIHAK KEDUA

DARNITAWATI, S.Sos
NIP. 19660420 199202 2 001

PIHAK PERTAMA,

MURNI ASNITA, S.Sos, M.Si
NIP. 19790826 200604 2 005

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	3
		Jumlah sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kualitas	Orang	30

Dumai, 01 Februari 2024

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN



DARNITAWATI, S.Sos
NIP. 19660420 199202 2 001

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



MURNI ASNITA, S. Sos, M. Si
NIP. 19790826 200604 2 005



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ns. ISRA MIARTI, S.Kep**
Nama : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **DARNITAWATI, S.Sos**
Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 01 Februari 2024

PIHAK KEDUA

DARNITAWATI, S.Sos
NIP. 19660420 199202 2 001

PIHAK PERTAMA,

Ns. ISRA MIARTI, S.Kep
NIP. 19750805 200312 2 011

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Perangkat Daerah	37
		Jumlah perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten/kota yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan spesifik	Orang	20

Dumai, 01 Februari 2024

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
HAK PEREMPUAN



DARNITAWATI, S.Sos
NIP.19660420 199202 2 001

Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



Ns. ISRA MIARTI, S. Kep
NIP.19750805 200312 2 011



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WAN HAMELDA, SST**
Nama : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **DARNITAWATI, S.Sos**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 01 Februari 2024

PIHAK KEDUA

DARNITAWATI, S.Sos
NIP. 19660420 199202 2 001

PIHAK PERTAMA,

WAN HAMELDA, SST
NIP. 19780308 200312 2 005

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	2
		Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	Orang	25

Dumai, 01 Februari 2024

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
HAK PEREMPUAN

DARNITAWATI S.Sos
NIP. 19660420 199202 2 001

Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

WAN HAMELDA, SST
NIP. 19780308 200312 2 005



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. NURMIATI**
Nama : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **YAYUK DWI RAHAYU, S.Farm.Apt, M.Sc**
Jabatan : **KEPALA BIDANG DATA INFORMASI GENDER DAN ANAK**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 01 Februari 2024

PIHAK KEDUA

YAYUK DWI RAHAYU, S.Farm.Apt, M.Sc
NIP. 19790817 200904 2 003

PIHAK PERTAMA,

Dra. NURMIATI
NIP. 19691015 199503 2 005

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	3

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG DATA
INFORMASI GENDER DAN ANAK



YAYUK DWI RAHAYU, S.Farm.Apt, M.Sc
NIP. 19790817 200904 2 003

Dumai, 01 Februari 2024

Pihak Pertama
Analisis Kebijakan Ahli Muda



Dra. NURMATI
NIP. 19691015 199503 2 005



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WAN ANNA FITRIYAH, SKM**
Nama : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **YAYUK DWI RAHAYU, S.Farm.Apt, M.Sc**
Jabatan : **KEPALA BIDANG DATA INFORMASI GENDER DAN ANAK**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 01 Februari 2024

PIHAK KEDUA

YAYUK DWI RAHAYU, S.Farm.Apt, M.Sc
NIP. 19790817 200904 2 003

PIHAK PERTAMA,

WAN ANNA FITRIYAH, SKM
NIP. 19780430 200003 2 004

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah dokumen data gender dan anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	1
		Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3

Dumai, 01 Februari 2024

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG DATA INFORMASI
GENDER DAN ANAK



YAYUK DWI RAHAYU, S.Farm.Apt, M.Sc
NIP. 19790817 200904 2 003

Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



WAN ANNA FITRIYAH, SKM
NIP. 19780430 200003 2 004



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. SURNIATI**
Nama : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **Ns. SRI BULAN, S.Kep**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 01 Februari 2024

PIHAK KEDUA

Ns. SRI BULAN, S.Kep
NIP. 19680414 198811 2 001

PIHAK PERTAMA,

Dra. SURNIATI
NIP. 19661222 199401 2 001

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	12

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PEMENUHAN
HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN



Ns. SRI BULAN, S. Kep
NIP. 19680414 198811 2 001

Dumai, 01 Februari 2024
Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



Dra. SURNIATI
NIP. 19661222 199401 2 001



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **dr. DEVY DIANNY, M.K.M**
Nama : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **Ns. SRI BULAN, S.Kep**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 01 Februari 2024

PIHAK KEDUA

Ns. SRI BULAN, S.Kep
NIP. 19680414 198811 2 001

PIHAK PERTAMA,

dr. DEVY DIANNY, M.K.M
NIP. 19750313 201001 2 011

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksananya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1

Dumai, 01 Februari 2024

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
DAN PERLINDUNGAN ANAK



Ns. SRI BULAN, S.Kep
NIP. 19680414 198811 2 001

Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN AHLI
MUDA



dr. DEVY DIANNY, M. K. M
NIP. 19750313 201001 2 011



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ns. KOMALA SARI, S. Kep, M.K.M**

Nama : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **Ns. SRI BULAN, S.Kep**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 01 Februari 2024

PIHAK KEDUA

**Ns. SRI BULAN, S.Kep
NIP. 19680414 198811 2 001**

PIHAK PERTAMA,

**Ns. KOMALA SARI, S. Kep, M.K.M
NIP. 19780418 200501 2 007**

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah dokumen hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1
		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1
		Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	5

Dumai, 01 Februari 2024

Pihak Kedua
 KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK
 ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK



Ns. SRI BULAN, S. Kep
 NIP. 19680414 198811 2 001

Pihak Pertama
 ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



Ns. KOMALA SARI, S. Kep. M. K. M
 NIP. 19780418 200501 2 007

FUNGSIONAL



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LINDA NATARIA, AMK**

Nama : **PENGELOLA PENGUATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **LILI KURNIATI, S.Tr.Keb**

Jabatan : **KASUBBAG TATA USAHA**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 01 Februari 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,

LILI KURNIATI, S.Tr.Keb
NIP. 19770727 200604 2 021

LINDA NATARIA, AMK
NIP. 19860616 201001 2 038

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	32
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	paket	1
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	1
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	paket	1
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	3
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	paket	3
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1
		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	14
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	8
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	1
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1
		Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	8
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara atau di rehabilitasi	Unit	1
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara atau di rehabilitasi	Unit	11

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	5,513,692,596	
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	4,606,169,960	
1.1.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp	4,606,169,960	
1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	466,103,844	
1.2.1	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp	5,590,300	
1.2.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp	125,000,000	
1.2.3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp	25,000,000	
1.2.4	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp	56,000,000	
1.2.5	penyediaan barang cetak dan pengandaan	Rp	34,999,798	
1.2.6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp	7,728,000	
1.2.7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp	211,785,746	
1.3	Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Rp	195,554,600	
1.3.1	Pengadaan Mebel	Rp	20,000,000	
1.3.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	35,554,600	
1.3.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	140,000,000	
1.4	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Rp	120,667,674	
1.4.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp	174,000	
1.4.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp	110,450,000	
1.4.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp	10,043,674	
1.5	Kegiatan Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Rp	125,196,518	
1.5.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas jabatan	Rp	38,530,000	
1.5.2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp	68,221,000	
1.5.3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp	5,680,000	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
1.5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp	6,055,518	
1.5.5	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp	6,710,000	
	Jumlah	Rp	5,513,692,596	


Dumai, 01 Februari 2024

Pihak Kedua
KASUBBAG TATA USAHA



LILI KURNIATI, S. Tr. Keb
NIP. 19770727 200604 2 021

Pihak Pertama
Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender



LINDA NATARIA, AMK
NIP. 19860616 201001 2 038



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ns. ESTER PRISKA DACHI, S.Kep**

Nama : **ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **LILI KURNIATI, S.Tr.Keb**

Jabatan : **KASUBBAG TATA USAHA**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 01 Februari 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,

LILI KURNIATI, S.Tr.Keb
NIP. 19770727 200604 2 021

Ns. ESTER PRISKA DACHI, S.Kep
NIP. 19850401 201102 2 002

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
: 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
1	2 Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai	3 Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	4 1 Mengarsipkan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Tata Usaha 2 Mengarsipkan data dan informasi Aparatur sipil Negara (ASN) 3 Membantu Mengevaluasi data/informasi ASN terkait dengan pembinaan dan pengawasan 4 Membantu Menyiapkan urusan surat menyurat/haskah dinas dan kearsipan 5 Mengarsipkan surat masuk/ yang telah didisposisi dan surat keluar	5 14 Dokumen 28 Dokumen 24 Dokumen 100 Lembar 100 Lembar	6 Melakukan pengarsipan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Tata Usaha Melakukan pengarsipan data dan informasi Aparatur sipil Negara (ASN) Membantu mengevaluasi data/informasi ASN terkait dengan pembinaan dan pengawasan Membantu mempersiapkan surat menyurat/ naskah dinas dan kearsipan Melakukan pengarsipan surat masuk dan surat keluar yang telah didisposisi

KASUBBAG TATA USAHA



LILI KURNIATI, S. Tr. Keb
NIP. 19770727 200604 2 021

Dumai, 01 Februari 2024
Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak



ESTER PRISKA DACHI, S. Kep
NIP. 19850401 201102 2 002



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RINI DEWI TOPUTRI, A.Md. Keb**

Nama : **PENGELOLA PENGUATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **YUNI WELDA, SE. M.IP**

Jabatan : **ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 01 Februari 2024

PIHAK KEDUA

YUNI WELDA, SE. M.IP
NIP. 19770614 200501 2 008

PIHAK PERTAMA,

RINI DEWI TOPUTRI, A.Md. Keb
NIP. 19760329 201001 2 004

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
Tahun Anggaran : 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	1 Membantu Penginputan Aliran Kas Anggaran Perubahan Tahun 2024 2 Membantu menyiapkan pelayanan administrasi keuangan meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 3 Membantu menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan Barang Milik Daerah 4 Membantu membuat laporan inventarisasi 5 Membantu menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait untuk kelancaran tugas 6 Membantu menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah serta sarana program 7 Membantu menyiapkan bahan tugas lain yang diberikan sesuai lingkup tugasnya	1 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Berkas	Pendokumentasian Penginputan Aliran Kas Anggaran Tahun 2024 Pendokumentasian menyiapkan pelayanan administrasi keuangan meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Pendokumentasian menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan Barang Milik Daerah Pendokumentasian membuat laporan inventarisasi Pendokumentasian menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait untuk kelancaran tugas Pendokumentasian menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah serta sarana program Pendokumentasian menyiapkan bahan tugas lain yang diberikan sesuai lingkup tugasnya

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

AHLI MUDA


YUNI WELDA, SE.
NIP. 19770614.200501.2.008

Dumai, 01 Februari 2024

PENGELOLA PENGUATAN PENGARUSUTAMAAN

GENDER


RINI DEWI TOPUTRI, A.Md Keb
NIP. 19760329.201001.2.001



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YENNI MARLINA, S.Sos**

Nama : **ANALIS PERENCANAAN**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **DARNITAWATI, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 01 Februari 2024

PIHAK KEDUA

DARNITAWATI, S.Sos
NIP. 19660420 199202 2 001

PIHAK PERTAMA,

YENNI MARLINA, S.Sos
NIP. 19790326 200701 2 005

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
: 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	1 Membantu membuat rencana Kegiatan Anggaran dan Penginputan Anggaran Tahun 2024 2 Membantu membuat konsep kegiatan di bidang PHP 3 Membantu membuat SK kegiatan dibidang PHP 4 Membantu membuat indikator kinerja th 2024 untuk th 2024 5 Membantu Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas 6 Membantu Mengadakan rapat Koordinasi dengan Kecamatan 7 Membantu Melaksanakan rapat Koordinasi dengan Kelurahan 8 Membantu Melaksanakan Kegiatan penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak 9 Membantu Membuat Laporan Kegiatan 10 Membantu Mengkonsep Surat Masuk dan Keluar Bidang Perlindungan Hak Perempuan	1 Laporan 1 Laporan 1 Kegiatan 1 Berkas 1 Laporan 4 Kegiatan 20 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 20 Surat	Pendokumentasian rencana Kegiatan Anggaran Tahun 2024 Pendokumentasian konsep kegiatan di bidang PHP Pendokumentasian SK Kegiatan di Bidang PHP Pendokumentasian Indikator Kinerja Tahun 2024 untuk Tahun 2024 Pendokumentasian Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Pendokumentasian rapat Koordinasi di Kecamatan Pendokumentasian rapat Koordinasi di Kelurahan Pendokumentasian Kegiatan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak Pendokumentasian Laporan Kegiatan Pendokumentasian Surat Masuk dan Keluar Bidang Perlindungan Hak Perempuan

Dumai, 01 Februari 2024

Kepala Bidang Perlindungan
Hak Perempuan

ANALIS PERENCANA

DARNITAWATI, S.Sos
NIP. 19660420 199202 2 001

YENNI MARLINA, S.Sos
NIP. 197903262007012005



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SYILVIYANTI, SST**

Nama : **ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **YAYUK DWI RAHAYU, S.Farm.Apt, M.Sc**

Jabatan : **KEPALA BIDANG DATA INFORMASI GENDER DAN ANAK**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 01 Februari 2024

PIHAK KEDUA

YAYUK DWI RAHAYU, S.Farm.Apt, M.Sc
NIP. 19790817 200904 2 003

PIHAK PERTAMA,

SYILVIYANTI, SST
NIP. 19830105 200501 2 003

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Satuan Kerja Perangkat Daerah: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
Tahun Anggaran : 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	
1	1	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai	3 Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	4 1 Membantu Pendataan Kelembagaan Organisasi Perempuan, Gender dan Anak 2 Membantu Pendataan Gender dan Anak 3 Membantu Membuat Laporan Kegiatan 4 Membantu Mengkonsep Surat Masuk dan Keluar bidang Data	5 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Kegiatan 15 Surat	6 Pendokumentasian Data Kelembagaan Organisasi Perempuan Gender dan Anak Pendokumentasian Data Gender dan Anak Pendokumentasian Laporan Kegiatan Pendokumentasian Surat Masuk dan Keluar Bidang Data

KEPALA BIDANG DATA INFORMASI
GENDER DAN ANAK

YAYUK DWI RAHAYU, S.Farm.Apt, M.Sc

NIP. 19790817 200904 2 003

Dumai, 01 Februari 2024

Analisis Pemberdayaan Perempuan
dan Anak



SYILVIYANTI, SST

NIP. 19830105 200501 2 003



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WIDYA ANUGRAH IMAN SARI, S.Psi**
Nama : **PENGAWAS PEREMPUAN DAN ANAK**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **FAJARIA RUSMEITY, SKM**
Jabatan : **KEPALA UPT PPA**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 01 Februari 2024

PIHAK KEDUA

**FAJARIA RUSMEITY, SKM
NIP. 19780524 200501 2 007**

PIHAK PERTAMA,

**WIDYA ANUGRAH IMAN SARI, S.Psi
NIP. 19930923 202012 2 018**

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
Tahun Anggaran : 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di kota dumi	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	1 Mengumpulkan hasil rekomendasi dalam pengelolaan kasus 2 Menerima pengaduan 3 Menyiapkan alat pendokumentasian (catatan, perekam audio, kamera, dll) 4 Memeriksa kelengkapan administrasi pengaduan sesuai dengan buku register / formulir 5 Mengadministrasi aduan kedalam buku register / formulir 6 Mempersiapkan surat pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang di lokasi kasus 7 Menyusun surat pengajuan kebutuhan sumber daya terkait pelaksanaan pendampingan 8 Memindahkan informasi dari buku register kasus kedalam aplikasi Simfoni PPA 9 Mendampingi korban di lembaga Hukum	50 kasus 50 korban 50 korban 50 korban 50 korban 50 korban 50 korban 50 kasus 50 korban	Melakukan pengumpulan hasil rekomendasi dalam pengelolaan kasus Melakukan penerimaan pengaduan Melakukan persiapan alat pendokumentasian (catatan, perekam audio, kamera, dll) Melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi, pengaduan sesuai dengan buku register / formulir Melakukan pengadministrasian aduan kedalam buku register / formulir Melakukan persiapan surat pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang di lokasi kasus Melakukan penyusunan surat pengajuan kebutuhan sumber daya terkait pelaksanaan pendampingan Melakukan pemindahan informasi dari buku register kasus kedalam aplikasi Simfoni PPA Melakukan pendampingan korban di lembaga di lembaga Hukum

KEPALA UPT PPA



FAUZIAH RUSMEITY, SKM
NIP. 19780524 200501 2 007

Dumai, 01 Februari 2024
PENGAWAS PEREMPUAN DAN ANAK



WIDYA ANUGRAH IMAN SARI, S.Psi
NIP. 19930923 202012 2 018

**PERUBAHAN
PERJANJIAN
KINERJA 2024**

ESSELON II

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maini Asna, SKM, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas PPPA Kota Dumai

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Paisal, SKM, MARS
Jabatan : Wali Kota Dumai

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. Paisal, SKM, MARS



Maini Asna, SKM, M.Si

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu sesuai standar	95
		Skor pencapaian Kota Layak Anak	800
		Skor pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	820

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 549.449.500	
2. Perlindungan Perempuan	Rp.444.527.000	
3. Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 34.957.100	
4. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 200.000.000	
5. Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 232.940.844	
6. Perlindungan Khusus Anak	Rp. 452.690.400	
7. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 5.678.802.306	

Dumai, 23 September 2024

Wali Kota Dumai,

Kepala Dinas,

H. Paisal, SKM, MARS



Maini Asna, SKM, M.Si

ESSELON III

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jusnidar, SKM
Jabatan : Sekretaris Dinas PPPA Kota Dumai

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Maini Asna, SKM, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas PPPA Kota Dumai

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Maini Asna, SKM, M.Si

Jusnidar, SKM

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100%

Program

Anggaran

Keterangan

Dumai, 23 September 2024

Kepala Dinas,

Sekretaris,



Majni Asna, SKM, M.Si

Jusnidar, SKM

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ns. Sri Bulan, S.Kep

Jabatan : Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Perlindungan Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Maini Asna, SKM, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas PPPA Kota Dumai

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Maini Asna, SKM, M.Si

Ns. Sri Bulan, S.Kep

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak	80%
		Menurunnya jumlah usia perkawinan anak	65%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 232.940.844	APBD
2. Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 34.957.100	APBD

Dumai, 23 September 2024

Kepala Dinas,



Maini Asna, SKM, M.Si

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak
dan Perlindungan Anak,



Ns. Sri Bulan, S.Kep

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yayuk Dwi Rahayu, S.Farm.Apt, M.Sc

Jabatan : Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Maini Asna, SKM, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas PPPA Kota Dumai

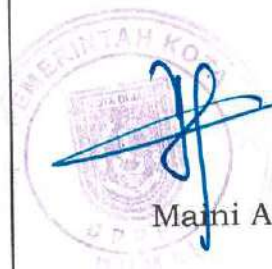
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,



Maini Asna, SKM, M.Si

Pihak Pertama,

Yayuk Dwi Rahayu, S.Farm.Apt, M.Sc

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Meningkatnya Pemanfaatan Data Terpilah Gender dan Anak	40%


Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 200.000.000	APBD

Dumai, 23 September 2024

Kepala Dinas,

Kepala Bidang Data dan Informasi
Gender dan Anak,


Maini Asna, SKM, M.Si


Yayuk Dwi Rahayu, S.Farm.Apt, M.Sc

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ns. Isra Miarti, S.Kep

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Maini Asna, SKM, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas PPPA Kota Dumai

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Maini Asna, SKM, M.Si

Ns. Isra Miarti, S.Kep

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan	40%
		Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	60%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Perlindungan Perempuan	Rp. 280.000.000	APBD & DAK
2. Perlindungan Khusus Anak	Rp. 190.400.000	DAK

Dumai, 23 September 2024

Kepala Dinas,

Plt. Kepala Bidang Perlindungan
Hak Perempuan,



Maini Asna, SKM, M.Si

Ns. Isra Miarti, S.Kep

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rezky Kartika Sari, SST, MPH
Jabatan : Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Maini Asna, SKM, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas PPPA Kota Dumai

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

Maini Asna, SKM, M.Si

Pihak Pertama,

Rezky Kartika Sari, SST, MPH



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Persentase ARG di Kota Dumai (%)	20%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Perlindungan Pengarusutamaan Gender	Rp. 549.449.500	APBD

Dumai, 23 September 2024

Kepala Dinas,

Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga



Maini Asna, SKM, M.Si

Rezky Kartika Sari, SST, MPH

ESSELON IV

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajaria Rusmeity, SKM
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Maini Asna, SKM, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas PPPA Kota Dumai

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Maini Asna, SKM, M.Si


Fajaria Rusmeity, SKM



**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/ kota yang mendapatkan layanan pengaduan	12 Orang
		Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/ kota	55 Layanan
		Jumlah AMPK yang mendapat layanan pengaduan	50 Orang
		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	10 Orang

Program

Anggaran

Keterangan

Dumai, 23 September 2024



Kepala Dinas,

Maini Asna, SKM, M.Si

Kepala UPT PPA,

Fajaria Rusmeity, SKM

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lili Kurniati, S.Tr, Keb
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Jusnidar, SKM
Jabatan : Sekretaris Dinas PPPA Kota Dumai

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,


Jusnidar, SKM

Pihak Pertama,


Lili Kurniati, S.Tr, Keb

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen
		Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
		Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen
		Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
		Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan


Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 842.295.440	APBD

Dumai, 23 September 2024

Sekretaris,


Jusnidar, SKM

Kasubbag Tata Usaha,


Lili Kurniati, S.Tr, Keb.

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuni Welda, SE, M.IP
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Jusnidar, SKM
Jabatan : Sekretaris Dinas PPPA Kota Dumai

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,


Jusnidar, SKM

Pihak Pertama,


Yuni Welda, SE, M.IP

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	22 Orang/ Bulan

Program

Anggaran

Keterangan

Sekretaris,


Jusnidar, SKM

Dumai, 23 September 2024

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
Ahli Muda,


Yuni Welda, SE. M.IP

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Surniati

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ns. Sri Bulan, S.Kep

Jabatan : Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

Ns. Sri Bulan, S.Kep

Pihak Pertama,

Dra. Surniati

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	12 Organisasi
		Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan	1 Dokumen

Program

Anggaran

Keterangan

Dumai, 23 September 2024

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak
dan Perlindungan Anak,

Analisis Kebijakan Ahli Muda,



Ns. Sri Bulan, S.Kep



Dra. Surniati

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Devy Dianny, M.K.M

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ns. Sri Bulan, S.Kep

Jabatan : Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

Ns. Sri Bulan, S.Kep

Pihak Pertama,

dr. Devy Dianny, M.K.M

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Jumlah dokumen hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/ kota	1 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/ kota	1 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/ kota	5 Dokumen

Program

Anggaran

Keterangan

Dumai, 23 September 2024

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak
dan Perlindungan Anak,

Analis Kebijakan Ahli Muda,



Ns. Sri Bulan, S.Kep



dr. Devy Dianny, M.K.M

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Nurmiati

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yayuk Dwi Rahayu, S.Farm.Apt, M.Sc

Jabatan : Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

Yayuk Dwi Rahayu, S.Farm.Apt, M.Sc

Pihak Pertama,

Dra. Nurmiati

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/ kota yang tersedia	1 Dokumen
		Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten / kota	3 Dokumen

Program

Anggaran

Keterangan

Kepala Bidang Data dan Informasi
Gender dan Anak,


Yayuk Dwi Rahayu, S.Farm.Apt, M.Sc

Dumai, 23 September 2024

Analisis Kebijakan Ahli Muda,


Dra. Nurmiati

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Murni Asnita, S.Sos, M.Si
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Perlindungan Hak Perempuan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ns. Isra Miarti, S.Kep
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

Ns. Isra Miarti, S.Kep

Pihak Pertama,

Murni Asnita, S.Sos, M.Si

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen
		Jumlah sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kapasitas	30 Orang

Program

Anggaran

Keterangan

Dumai, 23 September 2024

Kepala Bidang Perlindungan
Hak Perempuan



Ns. Isra Miarti, S.Kep

Analis Kebijakan Ahli Muda,



Murni Asnita, S.Sos, M.Si

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wan Hamelda, SST
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Perlindungan Hak Perempuan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ns. Isra Miarti, S.Kep
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

Ns. Isra Miarti, S.Kep

Pihak Pertama,

Wan Hamelda, SST

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/ kota	1 Organisasi
		Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/ kota	2 Dokumen
		Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu	1 Kegiatan

Program

Anggaran

Keterangan

Dumai, 23 September 2024

Kepala Bidang Perlindungan
Hak Perempuan,

Analisis Kebijakan Ahli Muda,



Ns. Isra Miarti, S.Kep



Wan Hamelda, SST

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Yasmanidar, SKM, M.IP
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rezky Kartika Sari, SST, MPH
Jabatan : Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

Rezky Kartika Sari, SST, MPH

Pihak Pertama,

Dewi Yasmanidar, SKM, M.IP

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) kewenangan kabupaten/ kota	1 Dokumen
		Jumlah Perangkat daerah yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) kewenangan kabupaten/ kota	37 Perangkat Daerah
		Jumlah perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) kewenangan kabupaten/ kota	37 Perangkat Daerah
		Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/ kota	1 Dokumen
		Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/ kota	1 Organisasi
		Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota yang mendapat peningkatan kapasitas	150 Orang
		Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota yang tersedia	1 Dokumen

Program

Anggaran


Keterangan

Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga,


Rezky Kartika Sari, SST, MPH

Dumai, 23 September 2024

Analisis Kebijakan Ahli Muda


Dewi Yasmanidar, SKM, M.Si

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resti Eko Yulianti, AMK
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT PPA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fajaria Rusmeity, SKM
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

Fajaria Rusmeity, SKM

Pihak Pertama,

Resti Eko Yulianti, AMK

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/ kota yang mendapatkan layanan pengaduan	12 Orang
		Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/ kota	55 Layanan
		Jumlah AMPK yang mendapat layanan pengaduan	50 Orang
		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	10 Orang

Program	Anggaran	Keterangan
1. Perlindungan Perempuan	Rp. 85.000.000	APBD & DAK
2. Perlindungan Khusus Anak	Rp. 262.290.400	APBD

Dumai, 23 September 2024

Kepala UPT PPA,



Fajaria Rusmeity, SKM

Kasubbag TU UPT PPA,



Resti Eko Yulianty, AMK

FUNGSIONAL

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syilviyanti, SST

Jabatan : Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Jusnidar, SKM

Jabatan : Sekretaris Dinas PPPA Kota Dumai

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Jusnidar, SKM


Syilviyanti, SST

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen
		Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
		Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen
		Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
		Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan

Program

Anggaran

Keterangan

-

-

-

Dumai, 23 September 2024

Sekretaris,

Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak,


Jusnidar, SKM


Syilviyanti, SST

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rini Dewi Toputri, A.Md, Keb
Jabatan : Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Jusnidar, SKM
Jabatan : Sekretaris Dinas PPPA Kota Dumai

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,


Jusnidar, SKM

Pihak Pertama,


Rini Dewi Toputri, A.Md, Keb

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan	Membantu penginputan aliran kas anggaran perubahan tahun 2024	1 Laporan
	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Membantu menyiapkan pelayanan administrasi keuangan meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	2 Laporan
		Membantu menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan barang milik daerah	1 Laporan
		Membantu membuat laporan inventarisasi	1 Laporan
		Membantu menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait untuk kelancaran tugas	1 Laporan
		Membantu menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah serta sarana program	1 Laporan
		Membantu menyiapkan bahan tugas lain yang diberikan sesuai lingkup tugasnya	1 Berkas

Program

Anggaran

Keterangan

Dumai, 23 September 2024

Sekretaris,

Pengelola Penguatan
Pengarusutamaan Gender ,


Jusnidar, SKM



Rini Dewi Toputri, A.Md, Keb

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emiliana Puji Rahayu
Jabatan : Pengadministrasi Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Jusnidar, SKM
Jabatan : Sekretaris Dinas PPPA Kota Dumai

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,


Jusnidar, SKM

Pihak Pertama,


Emiliana Puji Rahayu

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Membuat registrasi SPP, SPM untuk gaji, tambahan penghasilan dan kegiatan Tahun 2024	50 Berkas
		Melakukan pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) LS, UP dan GU kepada pengguna anggaran berdasarkan DPA dan anggaran kas Tahun 2024	50 Berkas
		Melakukan pemeriksaan kelengkapan GU dan melakukan pembayaran kepada PPTK setelah mendapat persetujuan dari pengguna anggaran sesuai ketentuan berlaku	500 Kwitansi
		Melakukan pemotongan dan pembayaran pajak kepada kas negara	450 SSP
		Mencatat seluruh pengeluaran berdasarkan SP2D yang diterima dan tanda bukti pengeluaran yang sah kedalam buku kas umum	500 Kwitansi
		Membuat laporan Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Secara Non Tunai Tahun 2024	12 Berkas
		Membuat surat pertanggung jawaban (SPJ) fungsional	150 Kegiatan
		Membantu mendokumentasikan seluruh tanda bukti pengeluaran serta dokumen lain secara tertib dan teratur	50 Berkas
		Membuat laporan tahunan pertanggung jawaban keuangan kepada anggaran melalui PPK SKPD	1 Dokumen

Program

Anggaran

Keterangan

Sekretaris,


Jusnidar, SKM

Dumai, 23 September 2024

Pengadministrasi Keuangan


Emiliana Puji Rahayu

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ns. Ester Priska Dachi, S.Kep
Jabatan : Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Lili Kurniati, S.Tr, Keb
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Lili Kurniati, S.Tr, Keb

Ns. Ester Priska Dachi, S.Kep

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	22 Orang/Bulan
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 Paket
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan
		Jumlah paket mebel yang disediakan	7 Unit
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	7 Unit
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit

	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	1 Laporan
	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan
	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan
	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 Unit
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 Unit
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau di rehabilitasi	1 Unit
	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ dirhabilitasi	12 Unit

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.836.506.866	APBD

Dumai, 23 September 2024

Kasubbag Tata Usaha,

Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak,



Lili Kurniati, S.Tr, Keb.



Ns. Ester Priska Dachi, S.Kep.

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yenni Marlina, S.Sos

Jabatan : Analis Perencanaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ns. Isra Miarti, S.Kep

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

Ns. Isra Miarti, S.Kep

Pihak Pertama,

Yenni Marlina, S.Sos

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Membantu membuat rencana kegiatan anggaran dan penginputan anggaran tahun 2024	1 Laporan
		Membantu membuat konsep kegiatan di bidang PHP	1 Laporan
		Membantu membuat SK kegiatan dibidang PHP	1 Kegiatan
		Membantu membuat indikator kinerja tahun 2024 untuk tahun 2024	1 Berkas
		Membantu melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas	1 Laporan
		Membantu mengadakan rapat koordinasi dengan kecamatan	4 Kegiatan
		Membantu melaksanakan rapat koordinasi dengan kelurahan	20 Kegiatan
		Membantu melaksanakan kegiatan penanganan kekerasan perempuan dan anak	1 Kegiatan
		Membantu membuat laporan kegiatan	1 Kegiatan
		Membantu mengkonsep surat masuk dan keluar bidang perlindungan hak perempuan (PHP)	20 Surat

Program

Anggaran

Keterangan

Dumai, 23 September 2024

Plt. Kepala Bidang Perlindungan
Hak Perempuan



Ns. Isra Miarti, S.Kep

Analisis Perencanaan,



Yenni Marlina, S.Sos

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widya Anugrah Iman Sari, S.Psi

Jabatan : Pengawas Perempuan dan Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fajaria Rusmeity, SKM

Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,

Fajaria Rusmeity, SKM

Pihak Pertama,

Widya Anugrah Iman Sari, S.Psi

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Mendampingi korban di lembaga Hukum Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Mengumpulkan hasil rekomendasi dalam pengelolaan kasus	50 Kasus
		Menerima pengaduan	50 Korban
		Menyiapkan alat pendokumentasian (catatan, perekam audio,kamera, dll)	50 Korban
		Memeriksa kelengkapan administrasi pengaduan sesuai dengan buku register / formulir	50 Korban
		Mengadministrasi aduan kedalam buku register / formulir	50 Korban
		Mempersiapkan surat pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang di lokasi kasus	50 Korban
		Menyusun surat pengajuan kebutuhan sumber daya terkait pelaksanaan pendampingan	50 Korban
		Memindahkan informasi dari buku register kasus kedalam aplikasi Simfoni PPA	50 Kasus
		Mendampingi korban di lembaga Hukum	50 Korban

Program

Anggaran

Keterangan

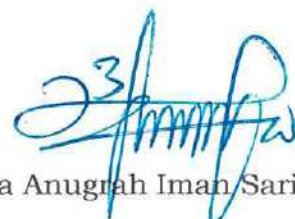
Dumai, 23 September 2024

Kepala UPT PPA,

Pengawas Perempuan dan Anak



Fajaria Rusmeity, SKM



Widya Anugrah Iman Sari, S.Psi.

Pengukuran Kinerja

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapat Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar	$\frac{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar}}{\text{jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang berkunjung di Upt PPA}} \times 100$	95	100	105.27%
		Skor Pencapaian Kota Layak Anak	$\frac{\text{Skor verifikasi administrasi}}{\text{skor evaluasi mandiri}} \times 100$	800	754.13	94.26%
		Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Jumlah Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) + Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam proses pembangunan + Inovasi	820	615	75%

Pagu Anggaran Program Tahun 2024 : Rp 7.593.367.150
 Realisasi Anggaran Program Tahun 2024 : Rp 6.475.171.701
 Persentase Capaian Program Tahun 2024 : 85.27%

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2024

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi	(%)
1	2	3	4	
I	Program Pengarusutamaan Gender	549.449.500	376.985.096	68.61%
1	Kegiatan pelebagaan pengarusutamaan gender (pug) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kotaDaerah	190.887.300	174.018.896	91.16
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	85.930.600	83.915.625	97.65
	Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	65.000.000	53.629.375	82.50
	Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	39.956.700	36.473.896	91.28
	Kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	59.562.200	47.127.200	79.12
	Sub Kegiatan Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, social dan ekonomi	55.000.000	43.565.000	79.20
	Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, social, dan ekonomi	3.562.200	3.562.200	100
	Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	300.000.00	155.839.000	51.94
	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	150.000.000	89.574.000	59.71
	Sub Kegiatan Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	150.000.000	66.265.000	44.17
2	Program Perlindungan Perempuan	444.527.000	392.402.900	88.27
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	155.000.000	144.451.350	93.13
	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	120.000.000	111.551.350	92.95

	Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	35.000.000	32.900.000	94
	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	164.527.000	147.188.000	89.46
	Sub Kegiatan Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	45.000.000	42.500.000	94.44
	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan	119.527.000	104.688.000	87.58
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000	100.762.550	80.61
	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	60.000.000	35.769.550	59.61
	Sub Kegiatan Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten/kota	25.000.000	24.994.000	99.97
	Sub Kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	40.000.000	40.000.000	100
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	34.957.100	28.872.500	82.59
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.957.100	28.872.500	82.59
	Sub Kegiatan Pengembangan kegiatan masyarakat untuk kegiatan peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	34.957.100	28.872.500	82.59
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	200.000.000	150.933.301	75.46
	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	150.933.301	75.46
	Sub Kegiatan Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota	100.000.000	72.323.500	72.35

	Sub Kegiatan Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota	100.000.000	78.609.801	78.60
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	232.940.844	193.804.489	83.19
	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	72.555.444	67.494.289	93.02
	Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	30.000.000	28.587.400	95.29
	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	42.555.444	38.906.889	91.42
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	160.385.400	126.310.200	78.75
	Sub Kegiatan Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	119.992.500	100.008.600	83.34
	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	40.392.900	26.301.600	65.11
6	Program Perlindungan Khusus Anak	452.690.400	364.860.872	80.59
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	64.965.000	99.94
	Sub Kegiatan Penguatan kerjasama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan layak anak dan DRPPA	65.000.000	64.965.000	99.94
	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	262.290.400	214.687.300	81.85
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	20.260.000	67.53
	Sub Kegiatan Koordinasi Layanan AMPK	232.290.400	192.427.300	82.83

	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	125.400.000	85.208.572	68.16
	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	125.400.000	85.208.572	68.16
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.678.802.306	5.135.201.443	90.42
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.354.720	34.455.920	72.76
	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	12.399.920	11.949.920	96.37
	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	5.887.000	5.887.000	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	4.479.000	4.479.000	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	4.028.800	4.028.800	100
	Sub Kegiatan penyusunan perubahan DPA-SKPD	3.008.800	1.200.000	39.88
	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9.880.600	4.840.600	48.99
	Sub Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah	7.670.600	2.070.600	26.99
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.876.217.750	3.565.889.849	91.99
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.876.217.750	3.565.889.849	91.99
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	518.103.844	473.720.718	91.43
	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.590.300	4.598.100	82.25
	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	125.000.000	110.636.966	88.50
	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	25.000.000	20.000.000	80

Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistic kantor	56.000.000	46.613.700	83.23
Sub Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan	84.999.798	79.855.300	93.94
Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.728.000	6.440.000	83.33
Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	213.785.746	205.576.652	96.16
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	195.554.600	134.765.418	68.91
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	20.000.000	19.990.418	99.95
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.554.600	0	0
Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	140.000.000	114.775.000	81.98
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	916.374.874	824.104.867	89.93
Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	174.000	170.000	97.70
Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	111.216.480	94.092.377	84.60
Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10.043.674	6.682.000	66.52
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	794.940.720	723.160.490	90.97
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.196.518	102.264.671	81.68
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	38.530.000	32.000.000	83.05
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	68.221.000	59.827.520	87.69
Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5.680.000	3.825.000	67.34
Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistic kantor	6.055.518	6.007.151	99.20
Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	6.710.000	605.000	9.01

LAMPIRAN

Dokumentasi

Penghargaan Kota Layak Anak



Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya

